

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dari hasil perhitungan, BOK dengan *load factor* 70% untuk trayek Cicaheum-Cibeureum adalah sebesar Rp 230,8 per penumpang untuk setiap satu kilometer; tarif jarak batas atas Rp 4.000 per penumpang; tarif BEP Rp 3.100 per penumpang; dan tarif jarak batas bawah sebesar Rp 2.500 per penumpang. Pada trayek Ledeng-Leuwi Panjang, BOK sebesar Rp 220,9; tarif jarak batas atas Rp 4.200; tarif BEP Rp 3.200; dan tarif jarak batas bawah Rp 2.600. Pada trayek Dipatiukur-Leuwi Panjang, BOK sebesar Rp 281,1; tarif jarak batas atas Rp 3.700; tarif BEP Rp 2.800; dan tarif jarak batas bawah Rp 2.200. Pada trayek Elang-Cibiru, BOK sebesar Rp 184,1; tarif jarak batas atas Rp 4.800; tarif BEP Rp 3.700; dan tarif jarak batas bawah Rp 3.000. Pada trayek Tanjungsari-Kebon Kelapa, BOK sebesar Rp 150,66; tarif jarak batas atas Rp 6.000; tarif BEP Rp 4.600; dan tarif jarak batas bawah Rp 3.700. Pada trayek Cicaheum-Leuwi Panjang, BOK sebesar Rp 236,29; tarif jarak batas atas Rp 4.000; tarif BEP Rp 3.100; dan tarif jarak batas bawah Rp 2.500. Pada trayek Ciburuy-Alun Alun, BOK sebesar Rp 166,9; tarif jarak batas atas Rp 5.300; tarif BEP Rp 4.100; dan tarif jarak batas bawah Rp 3.200. Perbedaan jarak antara masing-masing trayek tersebut sesungguhnya telah mengakibatkan perbedaan biaya operasional kendaraan juga, yang kemudian mengakibatkan perbedaan tarif.

- 2) Berdasarkan analisis isi yang dilakukan, terlihat bahwa terdapat beberapa formula perhitungan biaya menurut KM. No. 89 Tahun 2002 yang tidak diikuti oleh Perum DAMRI Bandung yaitu pada pengkategorian servis yang seharusnya terdiri dari servis besar dan servis kecil, tetapi Perum DAMRI Bandung tidak membuat pengkategorian tersebut. Namun untuk metode perhitungan biaya telah sesuai yaitu dengan menerapkan metode *full cost*. Selain itu, masih terdapat kesalahan untuk perhitungan Km-tempuh/hari.
- 3) Asumsi yang ditetapkan SK.687/AJ.206/DRJD/2002 untuk bus besar *single decker* belum seluruhnya diikuti oleh Perum DAMRI Bandung dalam menjalankan bus kota kelas ekonominya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis tarif bus kelas ekonomi berdasarkan biaya operasional kendaraan pada Perum DAMRI Bandung penulis ingin memberikan saran sebagai berikut.

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 38 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali untuk memenuhi penetapan tarif yang mendekati tarif berdasarkan BOK.
- 2) Perum DAMRI Bandung perlu untuk mengklasifikasikan reparasi/perbaikan kendaraan atas servis besar dan servis kecil, serta memperbaiki rumus untuk perhitungan Km-tempuh/hari.
- 3) Diperlukan studi lebih lanjut lagi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak dari perbedaan frekuensi reparasi kendaraan Perum DAMRI Bandung dari asumsi SK.687/AJ.206/DRJD/2002 terhadap kinerja bus.

- 4) Pada peneliti selanjutnya dapat meneliti analisis tarif bus kota kelas ekonomi Perum DAMRI Bandung dengan metode *activity based costing* (ABC) dan *variable costing*, serta berdasarkan *ability to pay* (ATP) dan *willingnes to pay* (WTP), meneliti kualitas pelayanan Perum DAMRI Bandung, dan melakukan penelitian dalam lingkup operasi bisnis yang lebih besar lagi yaitu bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) kelas ekonomi.